



Jadwal Shalat Hari Ini

Subuh : 05.12 WIB
 Zuhur : 12.34 WIB
 Ashar : 15.42 WIB
 Maghrib : 18.37 WIB
 Isya : 19.45 WIB

Sumber: Kompas.com

KOMENTAR

Inflasi Ramadan dan Hilirisasi Produk Pertanian

UDIN SUCHAINI

KENAIKAN harga-harga komoditas bahan makanan pokok pada awal tahun ini perlu diwaspadai. Dalam rangka antisipasi kenaikan harga akibat peningkatan konsumsi menjelang puasa Ramadan sekaligus dampak lanjutan dari El-Nino, pemerintah telah memberikan bansos untuk antisipasi.

Sayangnya, dorongan kenaikan harga komoditas bergejolak sangat tinggi tak tertahan oleh pasar yang memilih jalannya sendiri. Pembagian sembako oleh calon legislatif memperparah kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok hingga ke desa sebagai sumber produksi.

Gagal Panen

Kenaikan harga di tingkat petani rutin terjadi saat kekeringan, pakeklik, dan musim penghujan. Pengalaman setiap kejadian ini bukan hal baru; kekeringan parah pernah terjadi pada 1997-1998, 2012 dan 2014. Pakeklik setiap tahun pergantian musim selalu menjadi isu. Bagi petani, El-Nino dan pakeklik bukan satu-satunya masalah. --curah hujan tinggi semakin membuat masalah.

Curah hujan yang tinggi membuat tanaman membusuk sebelum panen. Masih untung bisa dipanen sebelum waktunya, karena seringkali banjir melanda kantong pertanian saat curah hujan tinggi. Dampaknya beras, cabai, tomat, bayam, bawang, dan hasil pertanian lain mengalami kenaikan harga yang signifikan di setiap intensitas hujan tinggi. Serta musim hujan yang seringkali berakhir banjir di area persawahan, menjadi fakta yang sering diungkap.

Gagal panen pun telah menjadi cerita rutin tak hanya di kalangan petani. Selain ketiga masalah di atas, hama wereng dan tikus, banjir, hingga letusan gunung berapi juga mewarnai drama gagal panen.

Bersambung ke A-7

Craha Kemandirian
DOMPET DHUFA SINGGALANG
 Jl. Ir. H. Juanda No. 31 C, Pasar Pagi, Padang Barat, Kota Padang

DOMPET DHUFA SINGGALANG

Zakat Penghasilan

Sumber yang bersih lebih aman, lebih barokah

Salurkan Zakat Anda melalui:

mandiri **111.000.500.4888**
 an Dompet Dhuafa Singgalang

BSI **234.2222.40**
 an Dompet Dhuafa Republik

Informasi: (0751) 40098 & 081267023333

www.ddsinggalang.org

Pojok

+ Pemerintah belum bayar utang minyak goreng Rp 344 miliar
 - Bayalah capek manjalang masuk puasa ko...
 + Ada kesalahan pada sirekap
 - Iko ciek lai, capek pelok-an, sudah tu minta maaf. Puaso ka masuk...

forogener



ANTRE SIM KELLILING

Sejumlah orang antre saat mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada layanan SIM Kelliling di Simpang Ganting, Padang, Senin (4/3). Mobil SIM Kelliling disiapkan Polresta Padang untuk memudahkan masyarakat dalam hal memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C. (Sawir Pribadi)

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp 344 Miliar

JAKARTA - SINGGALANG

Permasalahan pembayaran utang program satu harga minyak goreng (rafaksi) pemerintah ke pengusaha minyak goreng belum menemukan titik terang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Roy Nicholas Mandey mempertanyakan niat pemerintah untuk membayar utang tersebut.

Roy mengatakan saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan jumlah total yang harus



dibayar pemerintah kepada pengusaha minyak goreng. Pembahasan itu melibatkan Kemenko Perekonomian, Polhukam, Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, hingga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPSK).

Sayangnya, pada rapat koordinasi terbatas (rakornas) antar K/L tersebut, pihak peritel tidak dilibatkan.

"Sudah terjadi (rakornas) pada hari Kamis setelah Pemilu, tanggal 15 Februari lalu. Tapi setelah itu kami dapat info, karena kami tidak diundang. Kami dapat info

Bersambung ke A-7

Indonesia akan Masuk Fase Krisis Beras Lagi



Jakarta, Singgalang

Indonesia disebut akan masuk ke fase krisis beras lagi. Kepala Badan Pangan (Bapanas) Arief Prasetyo mengungkapkan hal ini

bisa terjadi apabila masa tanam bulan Maret-April menghasilkan produksi beras di bawah 2,5 juta ton.

Menurut dia, Indonesia

telah berhasil melewati fase krisis pertama. Fase krisis kedua ini tergantung tanam Maret dan April. Masih tanam di atas 1 juta hektar, maka bulan 7 kita tetap masih punya beras di atas 2,5 juta ton," kata Arief saat ditemui di Jakarta, Senin (4/3).

Sebelumnya, Indonesia berhasil telah melewati fase krisis. Di mana harga beras melambung tinggi di tengah produksi beras dalam negeri yang menurun.

Untuk itu, dia bilang pemerintah harus bersiaga dengan ketersediaan

Bersambung ke A-7

Daerah Berhasil Tekan Inflasi Dapat Insentif Rp 10 Miliar

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito



Karnavian menyatakan Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini akan cair mulai akhir April 2024. Pemerintah daerah diminta berlomba-lomba tekan inflasi jika ingin mendapatkan 'hadiah' tersebut.

"Sekarang sudah Maret, jadi nanti akhir April, silakan rekan-rekan berlomba-lomba untuk mendapatkan anggaran tersebut. Ini tambahan darah buat kita," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa & Idul Fitri 2024 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3).

Tito menyebut sepanjang 2023 Kementerian Keuangan telah mencairkan Rp 1 triliun DID untuk daerah yang dianggap berprestasi. Insentif

Bersambung ke A-7

Masjid DPRD Sumbar Itu Dilengkapi Perpustakaan Publik



Peresmian Masjid Asy Syura DPRD Sumbar, Senin (4/3) kemarin. (ist)

PADANG - Masjid Asy Syura DPRD Sumbar, diresmikan, Senin (4/3). Masjid berkapasitas lebih kurang 600 jamaah ini juga dilengkapi perpustakaan yang terbuka untuk umum.

Pembangunan Masjid Asy Syura menjadi prestasi terbaru Sekretariat DPRD Sumbar sebagai komitmen untuk mewujudkan gedung DPRD Sumbar sebagai rumah masyarakat, rumah literasi dan rumah pengembangan ketaatan keagamaan.

Sekretaris DPRD Sumbar,

Bersambung ke A-7

Jalan Samudera Padang Bakal Dikerjakan 2025



Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi

PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melanjutkan pembangunan jalan Samudera tapi lauk Kota Padang yang terbengkalai. Pada 2025 akan dialokasikan anggaran setelah hambatan selama ini selesai.

"Pada 2025 akan kita alokasikan anggaran untuk melanjutkan," sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, Senin (4/3).

Dikatakannya, selama ini Pemprov Sumbar sengaja belum melanjutkan proses pem-

Bersambung ke A-7

